

SISTEM PENYELANGGARAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Dosen Pengampu :

1. Prof. Bujang Rahman M.Si
2. Elisa Seftriyana M.Pd



Disusun Oleh Kelompok 4 :

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Keysa Aulian As'ya Putri | 2513023073 |
| 2. Nadifah Andresta Asmoro | 2513032076 |
| 3. Asep Nurman | 2513032086 |
| 4. Nadin Nurul Azizah | 2553032001 |
| 5. Octa Villanza Ramadhany | 2553032006 |
| 6. Aufa Fitria Nabilla | 2553032007 |

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami haturkan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah- Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Sistem Penyelenggaraan Pendidik di Indonesia". Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari semua pihak, dan apabila kesalahan kata atau penulisan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB 1.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN	6
2.1 Pengertian Sistem Pendidikan Nasional.....	6
2.2 Model-Model Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia.....	8
a. Pendidikan Formal	8
b. Pendidikan Nonformal	8
c. Pendidikan Informal.....	9
d. Pendidikan Keagamaan.....	9
e. Pendidikan Keagamaan.....	9
f. Pendidikan Vokasi	9
g. Pendidikan Profesi dan Spesialisasi	10
2.3 Hierarki penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia.....	10
BAB III.....	12
KESIMPULAN	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul. Melalui pendidikan, setiap individu tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengembangkan nilai spiritual, moral, serta kepribadian yang menjadi bekal untuk menghadapi tantangan kehidupan. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdul Rahman (2022) yang menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang berlangsung dari generasi ke generasi untuk menumbuhkan potensi manusia secara menyeluruh.

Di Indonesia, sistem pendidikan nasional memiliki kedudukan penting karena dirancang untuk menjamin pemerataan kesempatan, meningkatkan mutu, serta memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memuat tujuan, model, hingga hierarki penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan sistem pendidikan nasional menjadi strategis dalam menghadapi era globalisasi, di mana kompetisi sumber daya manusia semakin ketat dan menuntut penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Model penyelenggaraan pendidikan di Indonesia cukup beragam, mencakup pendidikan formal, nonformal, informal, keagamaan, vokasi, hingga pendidikan profesi dan spesialisasi. Setiap model memiliki peran tersendiri dalam membentuk kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, hierarki penyelenggaraan pendidikan juga menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga komite sekolah. Sinergi antar unsur ini sangat penting agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara merata, adil, dan berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional?
- b. Model-model penyelenggaraan pendidikan di Indonesia?
- c. Hirarkhi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia?

1.3 Tujuan

- 1.Mewujudkan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan
- 2.Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global
- 3.Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Abdul Rahman (2022) Pendidikan adalah usaha dalam keadaan sadar dalam mewujudkan sesuatu secara turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Pendidikan diwujudkan dengan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Hal tersebut dibenarkan juga oleh Soyomukti (2015: 22) yang mengatakan bahwa: “Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah semua situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Dalam artian Pendidikan selalu menemani manusia dalam pertumbuhan dan selama hidup.

Menurut Mukhlis, Hasan, Wahju, Angeline (2024), Sistem pendidikan nasional merupakan upaya atau usaha yang tersusun dalam mewujudkan suatu proses serta suasana pembelajaran supaya pelajar atau peserta didik menjadi aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Dengan sistem pendidikan, diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri, maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, maupun negara. Sistem pendidikan nasional Indonesia dimaksudkan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi manajemen pendidikan dalam menghadapi tuntutan globalisasi.

Era globalisasi yang sedang terjadi saat ini dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dan persaingan sumber daya manusia yang semakin ketat, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu upaya pemerintah untuk dapat menghasilkan sumber daya

manusia yang unggul tersebut adalah melalui pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa tingkat, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci tentang sistem pendidikan di Indonesia.

a. Pendidikan Dasar

Sekolah Dasar (SD): SD merupakan jenjang pendidikan pertama yang berlangsung selama enam tahun, yaitu dari kelas 1 hingga kelas 6. Sekolah Menengah Pertama (SMP): SMP adalah jenjang pendidikan menengah pertama yang berlangsung selama tiga tahun, yaitu dari kelas 7 hingga kelas 9.

b. Pendidikan Menengah

Sekolah Menengah Atas (SMA): SMA adalah jenjang pendidikan menengah atas yang berlangsung selama tiga tahun, yaitu dari kelas 10 hingga kelas 12. SMA memiliki beberapa program studi, seperti IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan Bahasa. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK): SMK adalah jenjang pendidikan menengah yang berfokus pada keterampilan dan keahlian tertentu yang terkait dengan dunia kerja. SMK menawarkan program kejuruan dalam berbagai bidang, seperti teknik, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain.

c. Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi: Pendidikan tinggi di Indonesia terdiri dari universitas, institut, dan politeknik. Perguruan tinggi menyediakan program sarjana (S1), program magister (S2), dan program doktor (S3) dalam berbagai disiplin ilmu. Sistem pendidikan di Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertanggung jawab atas kebijakan, standar, dan pengawasan pendidikan di seluruh tingkatan. Selain itu, lembaga-lembaga seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) juga terlibat dalam mengatur dan memastikan kualitas pendidikan di Indonesia.

2.2 Model-Model Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia

Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan memiliki berbagai model yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003) dan berbagai kebijakan turunannya. Berikut adalah model-model penyelenggaraan pendidikan di Indonesia:

a. Pendidikan Formal

Model pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan berkesinambungan. Yang di laksanakan oleh lembaga resmi dan di atur oleh pemerintah yang sudah memiliki kurikulum, jadwal belajar yang teratur, dan di akhiri dengan pemberian raport atau ijazah dan gelar resmi.

Contoh:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/TK/RA)
2. Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)
3. Pendidikan Menengah (SMA/MA, SMK/MAK)
4. Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi: Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi)

b. Pendidikan Nonformal

Dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal, secara terstruktur, berjenjang dan tidak berjenjang. Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan tertentu yang di miliki peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajar seumur hidup.

Contoh:

1. Kursus dan pelatihan (bahasa, komputer, keterampilan kerja, dsb.)
2. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
3. Pendidikan kesetaraan (Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMA)

c. Pendidikan Informal

Proses pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan terjadi secara mandiri atau spontan, di luar pendidikan formal, bersifat alami tanpa kurikulum resmi, dan tidak mendapat ijazah atau gelar resmi.

Contoh:

1. Pendidikan dari orang tua (moral, agama, etika, keterampilan hidup)
2. Belajar dari pengalaman sehari-hari di masyarakat

d. Pendidikan Keagamaan

Diselenggarakan oleh kementerian agama atau lembaga keagamaan, fokus pada ajaran dan nilai agama.

Contoh:

1. Madrasah (MI, MTs, MA)
2. Pesantren

e. Pendidikan Keagamaan

Model pendidikan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus atau kondisi tertentu.

Contoh:

1. Sekolah Luar Biasa (SLB)
2. Pendidikan inklusi di sekolah umum
3. Pendidikan di daerah terpencil, terbelakang, perbatasan, atau darurat

f. Pendidikan Vokasi

Fokus pada keterampilan kerja praktis untuk dunia industri.

Contoh:

1. SMK/MAK

2. Politeknik

3. Balai latihan kerja

g. Pendidikan Profesi dan Spesialisasi

Untuk melatih tenaga profesional di bidang tertentu.

Contoh:

Profesi guru, dokter, bidan, perawat, apoteker, akuntan, advokat

2.3 Hierarki penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia

Pada Penyelenggara Pendidikan tertinggi di Indonesia, pemerintah pusat menduduki dan memiliki peran utama sebagai pembuat kebijakan pendidikan nasional atau pendidikan resmi. Melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), pemerintah pusat menetapkan standar nasional pendidikan, kurikulum yang digunakan, serta mengatur peraturan dan kebijakan pendidikan secara nasional (Satria, 2023). Selain itu, pemerintah pusat juga berperan penting dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pendidikan atau pengevaluasi terhadap segala pelaksanaan pendidikan di seluruh Indonesia agar tetap sesuai dengan tujuan nasional.

Selanjutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan pendidikan berdasarkan kondisi wilayah yang mereka tinggali. Pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan anggaran pendidikan di daerah, serta pelaksanaan program wajib belajar. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat setempat, termasuk pengembangan kurikulum muatan lokal (Putra & Fitriani, 2023). Pemerintah daerah juga berperan dalam mengawasi jalannya pendidikan dasar dan menengah.

Pada tingkat pelaksana langsung, satuan pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan lembaga nonformal memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Satuan pendidikan bertugas

melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional yang telah ditetapkan (Lestaringtyas, 2024). Sekolah juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta penggunaan anggaran secara mandiri melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (Lestaringtyas, 2024). Dengan model MBS, sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan partisipasi guru, peserta didik, dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan (Setiawan, 2023).

Selain pemerintah, masyarakat dan penyelenggara non-pemerintah seperti yayasan, organisasi masyarakat, dan pihak swasta juga berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Mereka dapat mendirikan satuan pendidikan formal maupun nonformal, memberikan dukungan dana, fasilitas, serta tenaga pendidik untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional (Lestaringtyas, 2024). Partisipasi masyarakat ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas (Rachmawati, 2023).

Terakhir, komite sekolah atau madrasah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah terdiri dari orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya yang memberikan dukungan, masukan, dan kontrol sosial terhadap proses pendidikan (Rachmawati, 2023). Peran komite sekolah sangat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pendidikan di sekolah, sehingga terjalin sinergi antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan (Suryani, 2023).

BAB III

KESIMPULAN

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia merupakan sebuah upaya terstruktur untuk mencetak generasi bangsa yang cerdas, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan tuntutan zaman. Pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer ilmu, tetapi juga proses pengembangan potensi manusia secara utuh, meliputi aspek spiritual, moral, kecerdasan, keterampilan, dan pengendalian diri sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Rahman (2022) dan Soyomukti (2015). Melalui sistem pendidikan nasional, pemerintah berusaha menjamin pemerataan akses, meningkatkan mutu, serta menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan tantangan global.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mencakup berbagai model, baik formal, nonformal, informal, keagamaan, vokasi, maupun profesi, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat. Selain itu, hierarki penyelenggaraan pendidikan menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, masyarakat, hingga komite sekolah dalam mengelola dan mengawasi jalannya pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga keterlibatan seluruh elemen bangsa. Keseluruhan sistem ini diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa, sehingga mampu menghadapi tantangan era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, B. P., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). *Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan*. Al-Urwatul
- Anugrah Dwi. 2023. *Sistem Pendidikan di Indonesia*. FKIP UMSU.
- Lestaringtyas, L. (2024). *Manajemen berbasis sekolah melalui pemberdayaan masyarakat dan peran komite serta tantangan pelaksanaannya*. Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah, 5(1), 77–86.
- Mukhlis, T. I., Sumantri, M. B. A., Hasan, O., Wahyu, V., & Angeline, S. (2024). *Pengembangan Sistem Manajemen Pendidikan Terintegrasi Standard Internasional pada SMA/SMK/SLB Pada Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Pengabdian Dharma Laksana, 6(1).
- Non-Reg, N. M. E. E., Non-Reg, N. H. E. E., & Uyun, A. S. (2015). *PENGERTIAN PENDIDIKAN*.
- Putra, E., & Fitriani, S. (2023). *Desentralisasi pendidikan dalam perspektif otonomi daerah di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Pendidikan dan Pengembangan, 4(2), 111–120.
- Rachmawati, F. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 6(1), 65–74.
- Sasongko, D. G. S. (2018). *Pengertian Pendidikan*. Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, 2. Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam, 2(1), 1-8.
- Setiawan, H. (2023). *Implementasi manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia*. Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia, 9(2), 102–113.
- Suryani, D. (2023). *Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar*. Tadibuna: Jurnal Pendidikan Islam, 7(1), 41–54.